

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RAKERDA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
DAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025**

I. DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) BIDANG ORGANISASI PENUNJANG

NO	NORMA	PERMASALAHAN	USULAN SOLUSI
1. IKAHI			
1	1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan 3. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim	Keamanan Hakim saat pelaksanaan persidangan dan di luar persidangan	Perlu adanya penguatan Regulasi dan Standarisasi terhadap pelaksanaan PERMA no 6 tahun 2020 tentang perubahan atas PERMA no 5 tahun 2020 Dan peraturan KY nomor 8 tahun 2013 oleh Mahkamah Agung bersama KY
2	Pasal 4 huruf b Anggaran Dasar IKAHI hasil munas XX maksud dan tujuan didirikannya IKAHI adalah : a. memelihara dan membina kesatuan dan persatuan serta memperkokoh kesetiakawanan para anggotanya dengan memupuk solidaritas jiwa korp yang merasa memiliki, ikut bertanggung jawab dan berani mawas diri serta menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi anggota.	Belum pernah ada forum atau kegiatan bersama yang melibatkan seluruh anggota IKAHI yang bertugas di wilayah hukum PTA Bandar Lampung.	Agar pengurus daerah IKAHI (PTA Bandar Lampung) merencanakan untuk adanya kegiatan silaturahmi yang bernuansa refreshing setidaknya 1 kali dalam setahun.

2. IPASPI			
1	<p>1. Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;</p> <p>2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;</p> <p>3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;</p>	SDM IPASPI Khususnya Tenaga Teknis Bagian Kepaniteraan dan Kejurusitaan sudah memiliki Rancangan Naskah Akademik terkait jenjang jabatannya yang hanya terbatas sampai dengan Pengadilan Tingkat Banding guna mendukung terwujudnya jenjang karir tenaga fungsional Kepaniteraan dan Kejurusitaan dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai MA, sesuai dengan UU ASN	Mendorong Mahkamah Agung RI agar pemerintah segera mengesahkan naskah akademik tersebut dan merealisasikan isi naskah akademik yang sudah diusulkan oleh IPASPI Pusat.
2	Semestinya organisasi IPASPI Cabang PTA Bandar Lampung melaksanakan kegiatan bersama.	Beberapa tahun terakhir ini belum ada kegiatan yang melibatkan seluruh anggota IPASPI yang bertugas di wilayah PTA Bandar Lampung.	Agar pengurus daerah IPASPI (PTA Bandar Lampung) merencanakan untuk adanya kegiatan silaturahmi yang bernuansa refreshing setidaknya 1 kali dalam setahun.
3	AD/ART IPASPI Pasal 7 (Anggota, Persyaratan dan berakhirnya keanggotaan)	Belum dibentuk kepengurusan IPASPI di daerah dan tingkat banding	Segera dibentuk pengurus resmi IPASPI baik di daerah maupun di Tingkat Banding
3. PTWP			
1	Pasal 12 AD dan Pasal 6 ART PTWP	belum lengkapnya susunan pengurus PTWP cabang sewilayah PTA Bandar Lampung	Perlu segera menyusun struktur kepengurusan PTWP Cabang sewilayah PTA Bandar Lampung dan diteruskan ke PTWP daerah untuk disahkan
2	Pasal 16 AD PTWP	Kurang aktifnya pimpinan cabang PTWP dalam menyetorkan iuran anggota kepada PTWP daerah pta bansdar lampung.	Dijharapkan kepada seluruh pengurus PTWP Cabang sewilayah PTA Bandar Lampung untuk menyetorkan iuran anggota

			setiap awal bulan ke rekening PTWP daerah PTA Bandar Lampung dan kepada PTWP daerah diharapkan untuk melaporkan kondisi keuangan PTWP daerah setiap bulannya, paling lambat tanggal 6 bulan berjalan
3	PASAL 6 AD PTWP	Kurangnya sosialisasi program kerja PTWP daerah oleh pembina dan pengurus cabang PTWP	Perlu Dorongan dan motivasi oleh pembina dan pengurus cabang terhadap anggota untuk mengikuti latihan tenis secara rutin.
4. KOPERASI			
1	-	Kerja sama antar koperasi seluruh satker di wilayah PTA Bandar Lampung belum ada, sehingga jika ada yang mutasi dan promosi antar satker di wilayah PTA Bandar Lampung, masih terkendala penyelesaian administrasi/keuangannya	Dibuat MOU antar satker di wilayah PTA Bandar Lampung, agar jika ada mutasi pegawai, penyelesaian administrasi/keuangannya lancar/tuntas
3. DYK			
1	SK Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/07/SK/II/2002 tentang Dharmayukti Karini	Kurang aktifnya Istri para Pegawai Pengadilan dengan kegiatan-kegiatan organisasi Dharmayukti Karini	Adanya dukungan dari Pimpinan Pusat untuk memberikan motivasi kepada Istri para pegawai untuk aktif dalam mengikuti kegiatan Dharmayukti Karini;